

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asa Sukses*, Swadaya Group, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Armadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money laundering)*, Setara Press, Malang.
- B Djulaeka and Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Dadang Hawari, 2002, *Konsep Agama (Islam) menanggulangi NAZA*, Dana Bakti Prima.
- Subagyo Partodiharjo, 2014, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, Jakarta.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Fauziah Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, CV. Manhaji, Medan.
- Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ivan Yustiavandana-Arman Nefi-Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia Bogor, 2010.
- J.E. Sahetapy, 2003, *Business Uang Haram*, Jakarta: KHN (Komisi Hukum Nasional).

- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Publishing, Malang.
- Latief at al, 2001, *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Lubis, 2020, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Manhaji, Medan.
- M. Ridha Ma'roef, 1977, *Narkotika masalah dan bahayanya*, Dinas KOMDAK VIII, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis Frans, 2013, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Cetakan I*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Okta Jayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengakibatkan Matinya Anak)* (Palembang: Uin Raden Fatah, 2014).
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta.
- Rio Yulindo, 2013, *Kaspol Jihad dan Fadhlan, Jurnal, Analisis Yuridis Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian Putusan Pengadilan)*, Fakultas Hukum Universitas Batam.
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana jilid IA dan IB*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sumarno Ma'sum, 1987, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta.

- Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Alfabeta, Bandung.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, MQS Publishing, Bandung.
- Yunus Husein, 2003, *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, PPATK, Jakarta.

B. Jurnal, Internet, Skripsi, dan Tesis

- Anak Agung Gede Wiweka Narendra, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantra, *Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*. Jurnal Konstruksi Hukum1, no. 2, 2020.
- Cahaya Maduma Situmorang, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi
- Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Di Kalangan Generasi Muda*, Lex Crimen Vol. II/ No. 4/ Agustus/ 2013.
- Ferina Manjilatussyfa, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2016.
- Fitria Wijayanto, Skripsi, *Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Didapat Dari Kejahatan Narkotika Melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.
- <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positifindonesia>.
- Josef M Monteiro, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia25, no. 2.2007
- M. Ridha Ma'roef, *Narkotika masalah dan bahayanya*, Bandung, Dinas KOMDAK VIII, 1977
- Rio Yulindo, Kaspol Jihad dan Fadhlán, Jurnal, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika*

(Studi Penelitian Putusan Pengadilan), Fakultas Hukum Universitas Batam. 2013.

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung: MQS Publishing.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bentuk-bentuk TPPU dalam 7 Pasal, yakni Pasal 3 hingga Pasal 10. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPU dalam 6 Pasal, yakni Pasal 11 hingga Pasal 16.